

PRODUK REGIONAL DOMESTIK BRUTO KOTA SEMARANG MENURUT PENGELUARAN 2010 - 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SEMARANG**

**PRODUK REGIONAL DOMESTIK BRUTO
KOTA SEMARANG
MENURUT PENGELUARAN
2010 - 2016**



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SEMARANG MENURUT PENGELUARAN

2010-2016

ISSN : -
No. Publikasi : 33740.1705
Katalog BPS : 9302023.3374
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xi + 58 halaman

Naskah / *Manuscript* :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kover / *Cover Designed by* :
Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Ilustrasi Kover : -

Diterbitkan Oleh :
@BPS Kota Semarang

Dicetak oleh : CV. Citra Yunda

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA SEMARANG MENURUT LAPANGAN USAHA
2012-2016**

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Erisman, M.Si
Penanggung Jawab : Sarwono, S.Si, M.Si
Penyunting : Sarwono, S.Si, M.Si
Agustina Ouwpoly, SE.
Penulis : Agustina Ouwpoly, SE.

<http://semarangkota.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

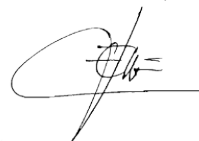
Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Semarang, September 2017
BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SEMARANG
KEPALA,



ERISMAN, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2
B. Kegunaan Statistik PDRB.....	3
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	5
A. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT)	6
B. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PKLNPRT)	9
C. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP)	12
D. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	14
E. Perubahan Inventori	19
F. Ekspor Impor Barang dan Jasa	22
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA SEMARANG BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KOTA SEMARANG TAHUN 2010-2016	25
A. Tinjauan Agregat PDRB Kota Semarang menurut Pengeluaran	26
B. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	31
C. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	36
D. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	36
E. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	38
F. Perkembangan Perubahan Inventori	39
G. Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	41

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KOTA SEMARANG TAHUN 2010-2016	43
	A. PDRB (Nominal)	44
	B. Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	45
	C. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB	46
	D. Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	47
BAB V	PENUTUP	48
	LAMPIRAN	50
	DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Adh Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2010-2016 (<i>Juta Rp</i>)	26
Tabel 2. PDRB Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2010-2016 (<i>Juta Rp</i>)	27
Tabel 3. Distribusi PDRB Adh Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2010-2016 (<i>Persen</i>)	28
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2010-2016 (<i>Persen</i>)	30
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2010-2016 (<i>Persen</i>)	30
Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2010-2016	31
Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2010-2016 (<i>Persen</i>)	33
Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2010-2016 (<i>Persen</i>).....	34
Tabel 9. Pertumbuhan Indeks Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2010-2016 (<i>Persen</i>)	35
Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Tahun 2010-2016	36
Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2010-2016	37
Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Tahun 2010-2016	39
Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Tahun 2010-2016 ...	40
Tabel 14. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita Tahun 2010-2016.	44
Tabel 15. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2010-2016	45
Tabel 16. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2010-2016	46
Tabel 17. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Tahun 2010-2016	47

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Perbandingan PDRB Adh Berlaku dan Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2010-2016	28
Grafik 2. Perbandingan Distribusi PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2010 dan Tahun 2016	29
Grafik 3. Pertumbuhan Beberapa Komponen Pengeluaran 2010-2016 (<i>Persen</i>) ..	41

<http://semarangkota.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (<i>Juta Rupiah</i>) Tahun 2010- 2016	52
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (<i>Juta Rupiah</i>) Tahun 2010- 2016	53
Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (<i>Persen</i>) Tahun 2010- 2016	54
Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (<i>Persen</i>) Tahun 2010- 2016	55
Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto menurut Pengeluaran (<i>Persen</i>)Tahun Tahun 2010- 2016	56
Lampiran 6. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (<i>Persen</i>) Tahun 2010- 2016	57

BAB I

PENDAHULUAN

<http://semarangkota.bps.go.id>

A. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/*region* tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 yang diharapkan dapat mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

1. Pendekatan Produksi,

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/*daerah/region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran,

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tidak langsung neto.

B. KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

-
1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/*daerah/region*. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
 2. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, atau setiap sektor, dari tahun ke tahun.
 3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah/*daerah/region*. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/*daerah/region*.
 4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran dapat menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/*luar wilayah*.
 5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan institusi dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
 6. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
 7. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<http://semarangkota.bps.go.id>

A. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PKRT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh institusi lain.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 (dua belas) COICOP tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

-
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
 - Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).
- Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas, menghasilkan besarnya PKRT adhBerlaku. PKRT adh Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT adh Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok COICOP,
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;;
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

B. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT (PKLNPRT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPR) sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasartersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan; pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain.

-
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
 - c. Penyusutan
 - d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKLNPRT adalah :

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

PKLNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP). Tahapan estimasi PKLNPRT adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PKLNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

b. Mengestimasi PKLNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PKLNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRTadh Berlaku. PKLNPRT adh Konstan 2010, diperoleh dengan cara *deflate* PKLNPRT adh Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

C. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PKP)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
- b. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; dan PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

2. Metode Penghitungan

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

a. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P adhBerlaku} = \text{Output non pasar-penjualan barangdan jasa} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut+ pengeluaran akhirseluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada diwilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

D. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi; reklamasi pantai; pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan; serta pencegahan banjir dan erosi).

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PMTB adalah :

- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga (level provinsi).
- Laporan keuangan perusahaan.
- Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- Publikasi Statistik Konstruksi.
- Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “*arus komoditas*”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-deflate PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “reflate” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit).

Kedua, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-“deflate” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data yang dikumpulkan antara lain nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

E. PERUBAHAN INVENTORI

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Tetap Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait, dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);

- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian.

Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

PendekatanLangsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adhBerlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan meng-*inflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan, bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. *men-deflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

F. EKSPOR IMPOR BARANG DAN JASA

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi ekspor impor adalah :

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- Neraca Pembayaran Indonesia dari Bank Indonesia
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu, nilai ekspor-impor tersebut masih

ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented trasnsaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<http://semarangkota.bps.go.id>

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA SEMARANG BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KOTA SEMARANG TAHUN 2010 - 2016

Perubahan struktur ekonomi Kota Semarang akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2010 sampai dengan 2016, tidak terlepas dari dua faktor yaitu

faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kota Semarang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

A. TINJAUAN AGREGAT PDRB KOTA SEMARANG MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kota Semarang menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang tetap menunjukkan arah positif.

Tabel 1. PDRB Adh Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2010-2016
(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Konsumsi Rumah Tangga	35.933.021,43	39.943.364,10	44.453.405,19	49.344.105,07	54.385.205,90	59.344.878,69	64.379.814,11
2. Konsumsi LNPRT	512.160,01	556.622,45	629.469,31	731.663,90	857.212,80	911.264,93	984.369,57
3. Konsumsi Pemerintah	11.378.412,79	12.552.639,12	13.833.180,51	15.305.022,34	16.785.246,00	19.040.273,79	19.257.425,92
4. PMTB	55.605.547,39	62.646.081,63	71.157.015,15	75.624.658,93	86.132.776,06	97.842.878,14	105.633.691,34
5. Perubahan Inventori	188.035,09	2.865.848,90	5.064.978,80	3.608.670,00	2.454.186,84	866.661,44	659.674,07
6. Ekspor	45,967,061.71	48,893,571.31	50,920,810.97	59,071,752.00	67,491,784.15	72,045,266.17	76,543,856.83
7. Impor	68,760,138.46	76,424,028.58	86,303,187.58	94,878,726.84	105,996,540.58	115,844,507.55	121,465,155.44
Total PDRB	80.824.099,97	91.034.098,92	99.755.672,36	108.807.145,40	122.109.871,16	134.206.715,61	145.993.676,40

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB atas dasar harga (adhb) Berlaku dan atas dasar harga (adhk) Konstan, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Nilai PDRB Kota Semarang adh Berlaku selama periode tahun 2010 sampai dengan 2016 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Tabel 2. PDRB Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2010-2016
(Juta Rupiah)

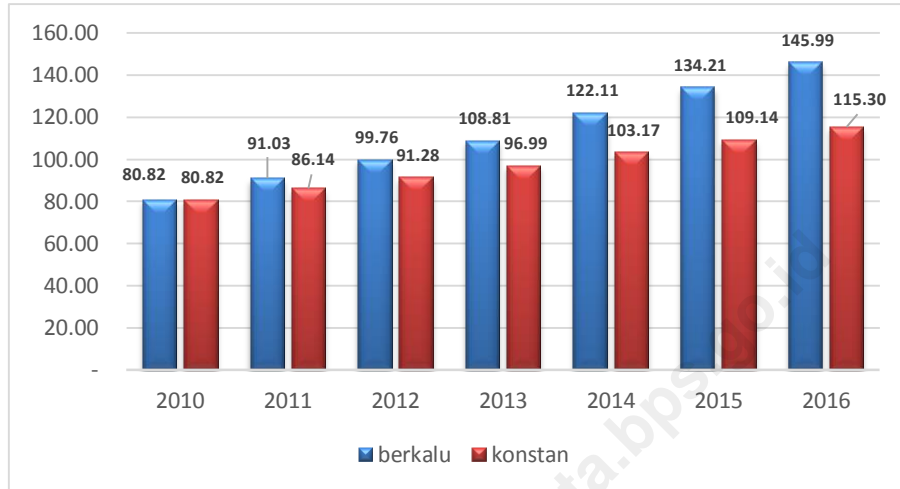
Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Konsumsi Rumah Tangga	35.933.021,43	37.950.614,69	40.094.767,97	42.210.872,71	44.222.786,56	46.212.845,92	49.380.462,97
2. Konsumsi LNPR	512.160,01	538.594,85	567.135,28	610.358,28	663.836,03	647.143,30	681.719,26
3. Konsumsi Pemerintah	11.378.412,79	11.622.528,00	11.956.191,92	12.463.888,33	12.726.796,45	13.096.268,70	12.787.612,23
4. PMTB	55.605.547,39	58.957.755,92	62.853.201,23	66.104.549,80	69.726.228,02	73.538.825,93	77.287.386,04
5. Perubahan Inventori	188.035,09	3.090.353,79	3.462.527,05	1.852.567,79	1.187.068,72	252.140,09	317.203,79
6. Ekspor	45.967.061,71	41.524.746,88	45.679.789,17	51.014.325,43	51.092.599,02	56.407.545,65	60.561.958,84
7. Impor	68.760.138,46	67.541.627,44	73.331.583,55	77.271.160,30	76.447.183,29	81.013.215,39	85.718.176,27
Total PDRB	80.824.099,97	86.142.966,70	91.282.029,07	96.985.402,04	103.172.131,51	109.141.554,19	115.298.166,86

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

Selain dinilai adh Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh Konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2010–2016, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Semarang berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada Tabel 2 diatas. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Dari grafik berikut, nampak bahwa nilai PDRB adh Berlaku lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh harga telah ditiadakan.

**Grafik 1. Perbandingan PDRB Adh Berlaku dan Adh Konstan 2010
Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2016**



Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPRRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

**Tabel 3. Distribusi PDRB Adh Berlaku
menurut Pengeluaran Tahun 2010 – 2016
(Persen)**

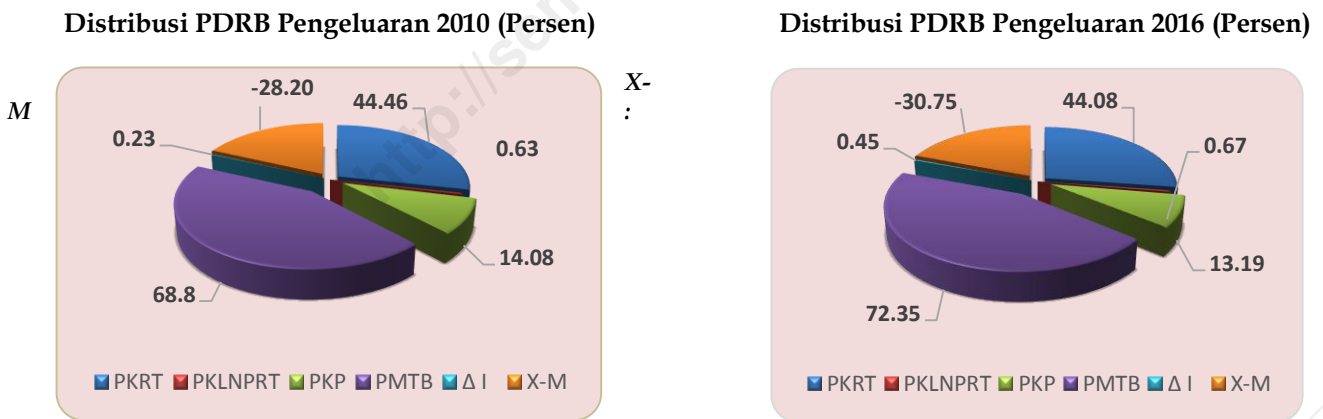
Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Konsumsi Rumah Tangga	44,46	43,88	44,56	45,35	44,54	44,22	44,10
2. Konsumsi LNPRT	0,63	0,61	0,63	0,67	0,70	0,68	0,67
3. Konsumsi Pemerintah	14,08	13,79	13,87	14,07	13,75	14,19	13,19
4. PMTB	68,80	68,82	71,33	69,50	70,54	72,90	72,35
5. Perubahan Inventori	0,23	3,15	5,08	3,32	2,01	0,65	0,45
6. Ekspor	56,87	53,71	51,05	54,29	55,27	53,68	52,43
7. Impor	85,07	83,95	86,51	87,20	86,80	86,32	83,20
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 3 diatas terlihat bahwa selama periode 2010 - 2016, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik hampir sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 40 persen).

Ekspor dan Impor juga mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 52-56 persen produk Kota Semarang diperdagangkan ke luar daerah Kota Semarang. Demikian halnya dengan impor mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 83-87 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dariluar Kota Semarang. Pengeluaran untuk kapital (PMTB) memberi kontribusi sekitar 68-72 persen, sedangkan kontribusi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 13,19 - 14,19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Pada tahun 2010-2016 perdagangan Kota Semarang yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih rendah dari nilai impor, yang berarti bahwa perdagangan Kota Semarang selalu menunjukkan posisi "defisit".

Grafik 2. Perbandingan Distribusi PDRB ADHB menurut Pengeluaran Tahun 2010 dan Tahun 2016



Ekspor Neto

ΔI : Perubahan Inventori

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Adh Konstan 2010
menurut Pengeluaran Tahun 2011 – 2016
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,61	5,65	5,28	4,77	4,50	6,85
2. Konsumsi LNPRT	5,16	5,30	7,62	8,76	-2,51	5,34
3. Konsumsi Pemerintah	2,15	2,87	4,25	2,11	2,90	-2,36
4. PMTB	6,03	6,61	5,17	5,48	5,47	5,10
5. Perubahan Inventori	1.543,50	12,04	-46,50	-35,92	-78,76	25,80
6. Ekspor	-9,66	10,01	11,68	0,15	10,40	7,36
6. Impor	-1,77	8,57	5,37	-1,07	5,97	5,81
Total PDRB	6,58	5,97	6,25	6,38	5,79	5,64

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang dari tahun 2011- 2016 secara rata-rata mencapai 6,11 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 6,58 persen (2011); 5,97 persen (2012); 6,25 persen (2013); 6,38 persen (2014); 5,79 persen (2015) dan 5,64 persen (2016). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 6,58 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2016 (5,64 persen).

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB menurut Pengeluaran
Tahun 2011- 2016
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	105,25	110,87	116,90	122,98	128,42	130,38
2. Konsumsi LNPRT	103,35	110,99	119,87	129,13	140,81	144,40
3. Konsumsi Pemerintah	108,00	115,70	122,79	131,89	145,39	150,59
4. PMTB	106,26	113,21	114,40	123,53	133,05	136,68
5. Perubahan Inventori	92,74	146,28	194,79	206,74	343,72	207,97
6. Ekspor	117,75	111,47	115,79	132,10	127,72	126,39
7. Import	113,15	117,69	122,79	138,65	142,99	141,70
Total PDRB	105,68	109,28	112,19	118,36	122,97	126,62

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPR, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri), juga menunjukkan peningkatan.

B. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Tahun 2010 – 2016**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)
Total Konsumsi Rumah Tangga							
a. ADHB (Miliar Rp)	35 933,02	39 943,36	44 453,40	49 344,10	54 385,20	59 344,88	64 379,81
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	35 933,02	37 950,61	40 094,77	42 210,87	44 222,79	46 212,85	49 380,46
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	44,46	43,88	44,56	45,35	44,54	44,22	44,10
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Ribu Rp)							
a. ADHB	87 473,18	95 236,81	104 141,93	113 671,28	123 113,91	132 131,50	138 694,59
b. ADHK 2010	87 473,18	90 485,49	93 930,88	97 192,66	100 108,86	102 893,01	106 381,22
Rata-rata konsumsi per- kapita/tahun (Ribu Rp)							
a. ADHB	23 033,80	25 145,16	27 499,89	30 007,83	32 507,71	34 885,89	37 226,07
b. ADHK 2010	23 033,80	23 890,68	24 803,54	25 669,87	26 433,32	27 166,23	28 553,06
Pertumbuhan ¹⁾ (% ADHK)							
a. Total konsumsi RT	-	5,61	5,65	5,28	4,77	4,50	6,85
b. Per-RT	-	3,44	3,81	3,47	3,00	2,78	3,39
c. Perkapita	-	3,72	3,81	3,49	2,97	2,77	5,10
Jumlah RT (unit)	410 789	419 411	426 854	434 301	441 747	449 135	464 184
Jumlah penduduk (org)	1 560 013	1 588 511	1 616 494	1 644 374	1 672 994	1 701 114	1 729 428

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

¹⁾Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010

Dalam kurun waktu tahun 2010 - 2016 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2010 s.d 2016 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 45,35 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 43,88 persen.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik maupun yang berasal dari impor turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per kapita terus meningkat dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Pada tahun 2010 konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 23,03 juta rupiah, yang artinya setiap penduduk Kota Semarang rata-rata mengeluarkan biaya sebesar 23,03 juta rupiah selama setahun untuk konsumsi, baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain). Pengeluaran tersebut terus meningkat setiap tahun dan tahun 2016 rata-rata konsumsi per kapita sebesar 37,22 juta.

Apabila dilihat menurut harga konstan, pertumbuhan konsumsi per kapita berada pada kisaran 2,77 - 5,10 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 5,10 persen dan terendah sebesar 2,77 persen pada tahun 2015. Pertumbuhan konsumsi per kapita setiap tahun baik menurut harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk Kota Semarang meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas).

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan sebesar 5,61 persen pada tahun 2011. Kemudian, melemah pada tiga tahun berikutnya yaitu berturut-turut sebesar 5,65 persen (2012), 5,28 persen (2013), 4,77 persen (2014), 4,50 persen (2015) dan 6,85 persen (2016).

Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 1 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Tabel 7 di bawah, memperlihatkan struktur penggunaan konsumsi akhir rumah tangga. Dari tabel tersebut nampak 3 (tiga) konsumsi yang peranannya paling besar, yaitu yang terbesar konsumsi makanan, minuman dan rokok, konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya; serta konsumsi perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga.

**Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Tahun 2010 – 2016¹⁾
(Persen)**

Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	30,99	29,96	29,38	29,57	29,06	28,83	29,27
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,79	3,79	3,44	3,19	3,16	3,13	3,12
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	17,84	17,81	17,70	17,89	18,47	18,35	17,95
d. Kesehatan & Pendidikan	9,17	9,00	8,94	8,70	8,77	8,71	8,80
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	28,51	29,64	30,61	30,68	30,30	30,53	30,24
f. Hotel & Restoran							
g. Lainnya	7,98	7,75	7,64	7,71	8,00	8,16	8,32
Total Konsumsi	1,71	2,05	2,28	2,28	2,25	2,29	2,30
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

¹⁾Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

**Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Tahun 2011 – 2016
(Persen)**

Kelompok Konsumsi (1)	2011 (3)	2012 (4)	2013 (5)	2014* (6)	2015* (6)	2016** (7)
a.						
Makanan, Minuman, dan Rokok	0,59	1,00	1,25	1,13	2,66	5,77
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,33	5,20	3,58	4,59	5,76	7,15
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,23	5,29	5,51	6,24	4,93	5,03
d. Kesehatan & Pendidikan	5,72	5,62	5,57	3,98	5,22	7,16
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	11,29	9,95	8,65	6,53	4,83	8,31
f. Hotel & Restoran						
g. Lainnya	2,68	5,75	4,84	7,57	6,32	7,77
Konsumsi Akhir Rumah Tangga	24,25	13,30	10,33	5,46	6,32	7,56
	5,61	5,65	5,28	4,77	4,50	6,85

Dari ketiga kelompok konsumsi terbesar tersebut, konsumsi makanan, minuman dan rokok pertumbuhannya relatif rendah setiap tahun, sangat berbeda dengan pertumbuhan kelompok perumahan dan transportasi yang cukup tinggi di setiap tahunnya. Pada tahun 2016 konsumsi perumahan tumbuh 5,03 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya, sedangkan konsumsi transportasi tumbuh 8,31 persen, meningkat dibanding pertumbuhan tahun 2015.

Pertumbuhan konsumsi selain makanan dan rokok yang lebih tinggi tersebut menunjukkan kebutuhan *non*-makanan menjadi semakin penting, hal ini sebagai akibat dari pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat yang telah mengalami perubahan/pergeseran. Pertumbuhan konsumsi (riil) ini juga dapat menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menggambarkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tingkat perubahan harga penggunaan konsumsi akhir rumah tangga secara implisit disajikan dalam Tabel 9. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rincian peningkatan harga pada kelompok konsumsi akhir rumah tangga sebesar 5,25 persen (2011); 5,34 persen (2012); 5,44 persen (2013); 5,20 persen (2014); 4,42 persen (2015) dan 1,53 persen (2016).

Tabel 9. Pertumbuhan Indeks Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2011 – 2016¹⁾
(Persen)

Kelompok Konsumsi	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6,83	8,07	10,31	7,13	5,44	4,13
b. Pakaian dan Alas Kaki						
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,41	-3,80	-0,73	4,43	2,28	0,80
d. Kesehatan & Pendidikan						
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,20	4,69	2,29	6,78	3,10	2,24
f. Hotel & Restoran	3,84	4,50	2,40	2,19	4,87	-0,78
g. Lainnya	5,11	3,78	6,77	6,33	4,66	2,69
Konsumsi Akhir Rumah Tangga	7,14	9,01	0,49	3,09	4,77	1,08
	5,25	5,34	5,44	5,20	4,42	1,53

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

¹⁾Tingkat perubahan harga produk konsumsi

C. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat ditingkatkan lagi. Beberapa lembaga yang memberikan andil cukup besar untuk PKLNPRT adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, dan lembaga keagamaan.

Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Tahun 2010 – 2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Konsumsi LNPRT							
a. ADHB (Miliar Rp)	512,16	556,62	629,47	731,66	857,21	911,26	984,37
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	512,16	538,59	567,14	610,36	663,84	647,14	681,72
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,63	0,61	0,63	0,67	0,70	0,68	0,67
Pertumbuhan (% ADHK)	5,16	5,16	5,30	7,62	8,76	-2,51	5,34

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas, dapat dilihat pertumbuhan konsumsi LNPRT dari tahun ke tahun yang terus meningkat. Pertumbuhan tahun 2013 dan 2014 meningkat cukup tinggi, yang salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran ormas, parpol, LSM dan lembaga

lainnya karena adanya pemilihan kepala daerah (bupati/walikota dan gubernur) pada tahun 2013 dan pemilihan umum (legislatif) serta pemilihan presiden pada tahun 2014.

D. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan konsumsi akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kota Semarang serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk *adh Berlaku* maupun *adh Konstan* 2010. Pada tahun 2011 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah *adh Berlaku* sebesar 12,5 triliun rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2016 nilainya mencapai 19,26 triliun rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah *adh Konstan* 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2011 - 2016

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Konsumsi Pemerintah						
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	12 552,64	13 833,18	15 305,02	16 785,25	19 040,27	19 257,42
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	11 622,53	11 956,19	12 463,89	12 726,80	13 096,27	12 787,61
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	13,79	13,87	14,07	13,75	14,19	13,19
Konsumsi Pemerintah per- kapita (<i>Ribu Rp</i>)						
a. ADHB	7 902,14	8 557,52	9 307,51	10 033,06	11 192,83	11 135,14
b. ADHK 2010	7 316,62	7 396,37	7 579,72	7 607,20	7 698,64	7 394,13
Pertumbuhan ¹⁾						
a. Total konsumsi pemerintah	2,15	2,87	4,25	2,11	2,90	-2,36
b. Konsumsi perkapita	0,31	1,09	2,48	0,36	1,20	-3,96
Jumlah penduduk (<i>org</i>)	1 588 511	1 616 494	1 644 374	1 672 994	1 701 114	1 729 428

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

¹⁾Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami sedikit penurunan, dari 13,79 persen ditahun 2011 menjadi 13,19 persen pada tahun 2016. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2016; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2015 yang mencapai 14,19 persen.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah perkapita. Pada tahun 2011 konsumsi pemerintah perkapita adh Berlaku sebesar 7,90 juta rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2016 konsumsi pemerintah per kapita sebesar 11,14 juta rupiah.

Konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per kapita). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Dalam kurun waktu 2011-2016, pertumbuhan konsumsi pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2013, sebesar 4,25 persen, dan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar -2,36 persen. Kondisi ini terjadi disebabkan adanya kebijakan pemerintah dalam hal penghematan anggaran. pada pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 2,48 persen serta terendah tahun 2016 -3,96 persen.

E. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)²². Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect-input*) di dalam

proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data di bawah ini menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2011 - 2016 berfluktuasi dari 6,03 persen (2011) menjadi 5,10 persen (2016). PMTB dalam bentuk bangunan memberikan proporsi lebih besar dibanding non-bangunan dalam pembentukan modal tetap bruto.

Dari sisi pertumbuhan adh Konstan, pertumbuhan PMTB bangunan lebih stabil setiap tahunnya, dan selama lima tahun ini berada pada kisaran 3,89 - 6,74 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014. Pertumbuhan PMTB non-bangunan sangat fluktuatif, tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 49,73 persen dan terendah pada tahun 2014 yang mengalami kontraksi pertumbuhan -9,63 persen.

**Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB
Tahun 2010 – 2016**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total PMTB							
a. ADHB (Miliar Rp)	55 605,55	62 646,08	71 157,02	75 624,66	86 132,78	97 842,88	105 633,69
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	55 605,55	58 957,76	62 853,20	66 104,55	69 726,23	73 538,83	77 287,39
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	68,80	68,82	71,33	69,50	70,54	72,90	72,35
Struktur PMTB ¹⁾							
a. Bangunan (Miliar Rp)	53 011,74	58 859,48	66 086,78	70 274,32	80 666,80	92 191,92	99 965,74
(%)	95,34	93,96	92,87	92,93	93,65	94,22	94,63
b. NonBangunan (Miliar Rp)	2 593,81	3 786,60	5 070,24	5 350,34	5 465,97	5 650,96	5 667,95
(%)	4,66	6,04	7,13	7,07	6,35	5,78	5,37
Total PMTB (Miliar Rp)	55 605,55	62 646,08	71 157,02	75 624,66	86 132,78	97 842,88	105 633,69
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ²⁾ (%)							
a. Bangunan	-	3,89	4,98	5,52	6,74	6,19	5,41
b. Non Bangunan	-	49,73	29,62	1,20	-9,63	-4,79	0,19
Total PMTB	-	6,03	6,61	5,17	5,48	5,47	5,10

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

¹⁾Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

²⁾Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

²⁾Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010

F. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Tahun 2010 – 2016**

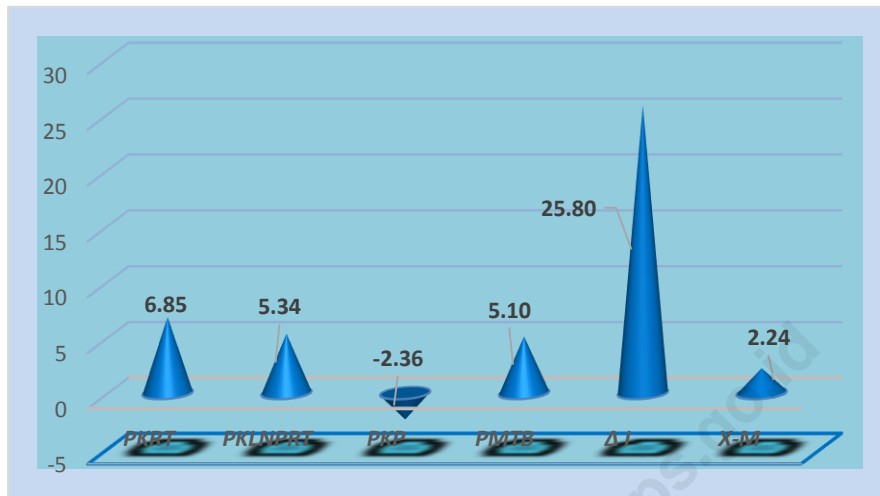
U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Nilai Inventori							
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	188,04	2 865,85	5 064,98	3 608,67	2 454,19	866,66	659,67
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	188,04	3 090,35	3 462,53	1 852,57	1 187,07	252,14	317,20
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,23	3,15	5,08	3,32	2,01	0,65	0,45

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsi, dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 proporsinya sebesar 0,23 persen, terendah dalam kurun waktu 2010-2016, dan tertinggi sebesar 5,08 persen pada tahun 2012.

Grafik 3.



Pertumbuhan Beberapa Komponen Pengeluaran Tahun 2016 (Persen)

G. PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar Kabupaten/Kota menjadikan komponen ini (dalam series PDRB tahun dasar 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda

“positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross-hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitungan ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply*.

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
MENURUT PENGELUARAN
KOTA SEMARANG
TAHUN 2010 - 2016

<http://semarangkota.bppt.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

A. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

Tabel 14. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Tahun 2010 – 2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nilai PDRB (Miliar Rp)							
- ADHB	80 824,10	91 034,10	99 755,67	108 807,15	122 109,87	134 206,72	145 993,68
- ADHK 2010	80 824,10	86 142,97	91 282,03	96 985,40	103 172,13	109 141,55	115 298,17
PDRB perkapita (Ribu Rp)							
- ADHB	51 809,89	57 307,82	61 711,13	66 169,34	72 988,83	78 893,43	84 417,32
- ADHK 2010	51 809,89	54 228,75	56 469,14	58 980,14	61 669,16	64 158,87	66 668,38
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	-	4,67	4,13	4,45	4,56	4,04	3,91
Jumlah penduduk (org)	1 560 013	1 588 511	1 616 494	1 644 374	1 672 994	1 701 114	1 729 428
Pertumbuhan	-	1,83	1,76	1,72	1,74	1,68	1,66

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

PDRB perkapita Kota Semarang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun , seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Semarang rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan perkapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 4 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 1,7 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan perkapita tersebut tidak saja terjadi secara kuantitas tetapi juga terjadi secara kualitas

B. PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Kota Semarang (sekitar 40 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kota Semarang sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 15. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2010 – 2016

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	35 933,02	39 943,36	44 453,40	49 344,10	54 385,20	59 344,88	64 379,81
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	45 967,06	48 893,57	50 920,81	59 071,75	67 491,78	72 045,27	76 543,86
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	0,78	0,82	0,87	0,83	0,81	0,82	0,84

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 0,78 kali dari yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Dari tahun ke tahun rasio ini relatif stabil dan justru mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 0,81. Hal ini lebih disebabkan peningkatan nilai ekspor yang cukup tinggi di tahun-tahun tersebut. Di sisi lain, meskipun konsumsi rumah tangga meningkat setiap tahun, namun kenaikannya tidak setajam kenaikan ekspor. Secara implisit data tersebut menjelaskan, bahwa baik nilai konsumsi akhir rumah tangga maupun ekspor meningkat dari tahun ke tahun dan peningkatan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga.

C. PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kota Semarang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 16. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2010–2016**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	35 933,02	39 943,36	44 453,40	49 344,10	54 385,20	59 344,88	64 379,81
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	55 605,55	62 646,08	71 157,02	75 624,66	86 132,78	97 842,88	105 287,39
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	0,64	0,64	0,62	0,65	0,63	0,61	0,61

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

Rata-rata rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB selama lima tahun terakhir sebesar 0,64. Hal ini dapat diartikan penggunaan produk untuk konsumsi rumah tangga 0,64 kali lebih kecil dibanding untuk PMTB. Nilai ini cenderung stabil selama enam tahun terakhir, namun pada tahun 2016 terjadi penurunan rasio dari 0,61 pada tahun 2010 menjadi 0,64. Penurunan tersebut lebih disebabkan peningkatan nilai PMTB yang cukup besar di tahun tersebut.

D. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 17. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Tahun 2010 – 2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Konsumsi Akhir (ADHB)(Miliar Rp)							
a. Rumah tangga	35 933,02	39 943,36	44 453,40	49 344,10	54 385,20	59 344,88	64 379,81
b. LNPRT	512,23	556,62	629,47	731,66	857,21	911,26	984,37
c. Pemerintah	11 378,41	12 552,64	13 833,18	15 305,02	16 785,25	19 040,27	19 257,43
Jumlah	47 823,66	53 052,62	58 916,05	65 380,78	72 027,66	79 296,41	84 621,61
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	80 824,10	91 034,10	99 755,67	108 807,15	122 109,87	134 206,72	145 993,68
Proporsi	59,17	58,28	59,06	60,09	58,99	59,09	57,96

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

Lebih dari 58 persen produk barang dan jasa yang berada di wilayah domestik Kota Semarang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Proporsi ini terus berfluktuasi dari tahun ke tahun, dari 59,17 persen pada tahun 2010 menjadi 57,96 persen pada tahun 2016. Sedangkan produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir, yaitu PMTB dan ekspor memiliki peran yang relatif kecil, sebesar kurang dari 41 persen.

BAB V

PENUTUP

<http://semarangkota.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2010 - 2016 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Semarang pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator social demografi (seperti penduduk, rumah tangga dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series dari tahun 2010 s.d 2016, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dbb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indicator yang diturunkan dari sajian dat PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indicator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposable, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variable ekonomi dan variable yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industry), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagai data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current transfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan ekonomi Kota Semarang terhadap ekonomi daerah lain (*rest of the region*).

LAMPIRAN

<http://semarangkota.go.id>

CATATAN :

FORMAT TABEL POKOK UNTUK PDRB PENGELUARAN KAB/KOTA :

1. Pengeluaran Konsumsi

Rumah tangga

- 1.a. Makanan, Minuman dan Rokok
- 1.b. Pakaian dan Alas Kaki
- 1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
- 1.d. Kesehatan dan Pendidikan
- 1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
- 1.f. Hotel dan Restoran
- 1.g. Lainnya

2. Pengeluaran Konsumsi

LNPRT

4. Pembentukan

Modal Tetap Bruto

- 4.a. Bangunan
- 4.b. Non-Bangunan

5. Perubahan

Inventori

Net Ekspor

PDRB

**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, (Juta Rupiah) Tahun 2010-2016**

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
1. Pengeluaran							
Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g)	35,933,021.43	39,943,364.10	44,453,405.19	49,344,105.07	54,385,205.90	59,344,878.69	64,379,814.11
1.a. Makanan, Minuman Selain Restoran	11,135,546.72	11,966,087.35	13,061,831.05	14,589,147.67	15,805,038.45	17,108,047.29	18,843,207.15
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1,362,696.32	1,512,385.94	1,530,525.56	1,573,704.75	1,718,854.97	1,859,369.95	2,008,186.72
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	6,409,071.35	7,112,716.90	7,869,640.45	8,825,229.49	10,044,865.68	10,890,230.38	11,559,328.48
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,295,974.51	3,595,924.59	3,976,030.70	4,293,347.55	4,767,252.63	5,171,274.25	5,665,362.59
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	10,245,902.87	11,840,967.72	13,605,547.85	15,137,166.19	16,478,833.93	18,115,739.73	19,468,210.48
1.f. Hotel dan Restoran	2,867,673.27	3,095,002.56	3,396,688.22	3,802,218.19	4,349,043.02	4,839,733.56	5,356,422.79
1.g. Lainnya	616,156.39	820,279.03	1,013,141.37	1,123,291.23	1,221,317.22	1,360,483.53	1,479,095.92
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	512,160.01	556,622.45	629,469.31	731,663.90	857,212.80	911,264.93	984,369.57
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,378,412.79	12,552,639.12	13,833,180.51	15,305,022.34	16,785,246.00	19,040,273.79	19,257,425.92
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	55,605,547.39	62,646,081.63	71,157,015.15	75,624,658.93	86,132,776.06	97,842,878.14	105,633,691.34
4.a. Bangunan	53,011,739.76	58,859,479.23	66,086,776.64	70,274,315.33	80,666,804.80	92,191,922.76	99,965,743.17
4.b. Non-Bangunan	2,593,807.63	3,786,602.40	5,070,238.51	5,350,343.60	5,465,971.25	5,650,955.38	5,667,948.17
5. Perubahan Inventori	188,035.09	2,865,848.90	5,064,978.80	3,608,670.00	2,454,186.84	866,661.44	659,674.07
6. Ekspor	45,967,061.71	48,893,571.31	50,920,810.97	59,071,752.00	67,491,784.15	72,045,266.17	76,543,856.83
7. Impor	68,760,138.46	76,424,028.58	86,303,187.58	94,878,726.84	105,996,540.58	115,844,507.55	121,465,155.44
PDRB PENGELUARAN	80,824,099.97	91,034,098.92	99,755,672.36	108,807,145.40	122,109,871.16	134,206,715.61	145,993,676.40

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

**Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, (Juta Rupiah) Tahun 2010-2016**

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g)	35,933,021.43	37,950,614.69	40,094,767.97	42,210,872.71	44,222,786.56	46,212,845.92	49,380,462.97
1.a. Makanan, Minuman Selain Restoran	11,135,546.72	11,200,855.11	11,313,397.16	11,455,116.86	11,584,352.56	11,892,219.60	12,578,741.41
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1,362,696.32	1,408,086.56	1,481,338.22	1,534,362.50	1,604,864.56	1,697,331.90	1,818,647.34
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	6,409,071.35	6,744,113.42	7,101,024.47	7,492,525.28	7,960,304.60	8,352,604.15	8,772,818.07
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,295,974.51	3,484,570.79	3,680,375.82	3,885,224.70	4,040,038.00	4,250,859.99	4,555,144.40
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	10,245,902.87	11,402,869.82	12,537,399.43	13,622,075.66	14,512,122.06	15,212,832.08	16,476,723.81
1.f. Hotel dan Restoran	2,867,673.27	2,944,540.25	3,113,831.73	3,264,572.13	3,511,819.02	3,733,889.91	4,024,153.87
1.g. Lainnya	616,156.39	765,578.73	867,401.13	956,995.59	1,009,285.76	1,073,108.29	1,154,234.07
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	512,160.01	538,594.85	567,135.28	610,358.28	663,836.03	647,143.30	681,719.26
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,378,412.79	11,622,528.00	11,956,191.92	12,463,888.33	12,726,796.45	13,096,268.70	12,787,612.23
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	55,605,547.39	58,957,755.92	62,853,201.23	66,104,549.80	69,726,228.02	73,538,825.93	77,287,386.04
4.a. Bangunan	53,011,739.76	55,074,108.47	57,819,322.63	61,010,269.57	65,122,509.72	69,155,738.03	72,895,902.54
4.b. Non-Bangunan	2,593,807.63	3,883,647.45	5,033,878.59	5,094,280.23	4,603,718.31	4,383,087.90	4,391,483.50
5. Perubahan Inventori	188,035.09	3,090,353.79	3,462,527.05	1,852,567.79	1,187,068.72	252,140.09	317,203.79
6. Ekspor	45,967,061.71	41,524,746.88	45,679,789.17	51,014,325.43	51,092,599.02	56,407,545.65	60,561,958.84
7. Impor	68,760,138.46	67,541,627.44	73,331,583.55	77,271,160.30	76,447,183.29	81,013,215.39	85,718,176.27
PDRB PENGELUARAN	80,824,099.97	86,142,966.70	91,282,029.07	96,985,402.04	103,172,131.51	109,141,554.19	115,298,166.86

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Tahun 2010-2016 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g)	44.46	43.88	44.56	45.35	44.54	44.22	44.10
1.a. Makanan, Minuman Selain Restoran	13.78	13.14	13.09	13.41	12.94	12.75	12.91
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1.69	1.66	1.53	1.45	1.41	1.39	1.38
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	7.93	7.81	7.89	8.11	8.23	8.11	7.92
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4.08	3.95	3.99	3.95	3.90	3.85	3.88
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	12.68	13.01	13.64	13.91	13.50	13.50	13.33
1.f. Hotel dan Restoran	3.55	3.40	3.41	3.49	3.56	3.61	3.67
1.g. Lainnya	0.76	0.90	1.02	1.03	1.00	1.01	1.01
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0.63	0.61	0.63	0.67	0.70	0.68	0.67
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14.08	13.79	13.87	14.07	13.75	14.19	13.19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	68.80	68.82	71.33	69.50	70.54	72.90	72.35
4.a. Bangunan	65.59	64.66	66.25	64.59	66.06	68.69	68.47
4.b. Non-Bangunan	3.21	4.16	5.08	4.92	4.48	4.21	3.88
5. Perubahan Inventori	0.23	3.15	5.08	3.32	2.01	0.65	0.45
6. Ekspor	56.87	53.71	51.05	54.29	55.27	53.68	52.43
7. Impor	85.07	83.95	86.51	87.20	86.80	86.32	83.20
PDRB PENGELUARAN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

**Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Tahun 2011-2016 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g)	5.61	5.65	5.28	4.77	4.50	6.85
1.a. Makanan, Minuman Selain Restoran	0.59	1.00	1.25	1.13	2.66	5.77
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3.33	5.20	3.58	4.59	5.76	7.15
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	5.23	5.29	5.51	6.24	4.93	5.03
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5.72	5.62	5.57	3.98	5.22	7.16
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	11.29	9.95	8.65	6.53	4.83	8.31
1.f. Hotel dan Restoran	2.68	5.75	4.84	7.57	6.32	7.77
1.g. Lainnya	24.25	13.30	10.33	5.46	6.32	7.56
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5.16	5.30	7.62	8.76	(2.51)	5.34
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.15	2.87	4.25	2.11	2.90	(2.36)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.03	6.61	5.17	5.48	5.47	5.10
4.a. Bangunan	3.89	4.98	5.52	6.74	6.19	5.41
4.b. Non-Bangunan	49.73	29.62	1.20	(9.63)	(4.79)	0.19
5. Perubahan Inventori	1,543.50	12.04	(46.50)	(35.92)	(78.76)	25.80
6. Ekspor	(9.66)	10.01	11.68	0.15	10.40	7.36
7. Impor	(1.77)	8.57	5.37	(1.07)	5.97	5.81
PDRB PENGELUARAN	6.58	5.97	6.25	6.38	5.79	5.64

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

**Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Pengeluaran, Tahun 2011-2016 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g)	105.25	110.87	116.90	122.98	128.42	130.38
1.a. Makanan, Minuman Selain Restoran	106.83	115.45	127.36	136.43	143.86	149.80
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	107.41	103.32	102.56	107.10	109.55	110.42
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	105.47	110.82	117.79	126.19	130.38	131.76
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	103.20	108.03	110.50	118.00	121.65	124.37
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	103.84	108.52	111.12	113.55	119.08	118.16
1.f. Hotel dan Restoran	105.11	109.08	116.47	123.84	129.62	133.11
1.g. Lainnya	107.14	116.80	117.38	121.01	126.78	128.15
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	103.35	110.99	119.87	129.13	140.81	144.40
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	108.00	115.70	122.79	131.89	145.39	150.59
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	106.26	113.21	114.40	123.53	133.05	136.68
4.a. Bangunan	106.87	114.30	115.18	123.87	133.31	137.13
4.b. Non-Bangunan	97.50	100.72	105.03	118.73	128.93	129.07
5. Perubahan Inventori	92.74	146.28	194.79	206.74	343.72	207.97
6. Ekspor	117.75	111.47	115.79	132.10	127.72	126.39
7. Impor	113.15	117.69	122.79	138.65	142.99	141.70
PDRB PENGELUARAN	105.68	109.28	112.19	118.36	122.97	126.62

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Lampiran 6. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, (Persen) Tahun 2011 - 2016

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g)	5.25	5.34	5.44	5.20	4.42	1.53
1.a. Makanan, Minuman Selain Restoran	6.83	8.07	10.31	7.13	5.44	4.13
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	7.41	(3.80)	(0.73)	4.43	2.28	0.80
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	5.47	5.08	6.28	7.13	3.32	1.06
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3.20	4.69	2.29	6.78	3.10	2.24
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	3.84	4.50	2.40	2.19	4.87	(0.78)
1.f. Hotel dan Restoran	5.11	3.78	6.77	6.33	4.66	2.69
1.g. Lainnya	7.14	9.01	0.49	3.09	4.77	1.08
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3.35	7.40	8.00	7.72	9.05	2.54
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.00	7.13	6.13	7.41	10.23	3.58
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.26	6.55	1.05	7.98	7.71	2.73
4.a. Bangunan	6.87	6.95	0.77	7.54	7.62	2.87
4.b. Non-Bangunan	(2.50)	3.30	4.27	13.05	8.59	0.11
5. Perubahan Inventori	(7.26)	57.74	33.16	6.14	66.26	(39.50)
6. Ekspor	17.75	(5.33)	3.88	14.08	(3.31)	(1.04)
7. Impor	13.15	4.01	4.33	12.92	3.13	(0.90)
PDRB PENGELUARAN	5.68	3.41	2.66	5.50	3.90	2.97

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Sistem Neraca Nasional 2008*, Jakarta, 2013.
2. _____, *Pedoman Penyusunan PDRB Kabupaten/Kota Tahun Dasar 2010 Menurut Pengeluaran*, Jakarta, 2014.
3. _____, *Booklet Perubahan Tahun Dasar PDB Berbasis SNA 2008*, Jakarta, 2014.
4. _____, *Produk Domestik Bruto menurut Penggunaan 2008-2013*, Jakarta, 2014
5. BPS Provinsi Jawa Tengah, *Tabel Input Output Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
6. _____, *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
7. _____, *Beberapa Indikator Makro Sosial Ekonomi Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
8. _____, *Jawa Tengah dalam Angka*, berbagai seri, Semarang.
9. _____, *Statistik Air Bersih Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
10. _____, *Statistik Impor Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
11. _____, *Statistik Industri Manufaktur Besar Sedang Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
12. _____, *Statistik Ekspor Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.

<http://semarangkota.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SEMARANG**

Jln. Inspeksi Kali Semarang no.1, Semarang, Jawa Tengah

Telp/ Fax 024-3546413

E-mail : bps3374@bps.go.id

Website : <http://semarangkota.bps.go.id>